

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 September 2018/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
**SUB UNIT KERJA** : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZAKIAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 480958

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 43 m2/40 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/126 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 206.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOTOR, HONDA/SOLO VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 86.456.874**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 692.456.874**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 692.456.874

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.